

## LEMBAR PENGESAHAN

### Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan II 2019

Judul : Optimalisasi Kebermanfaatan Analisis APBN melalui Infografis *Critical View Analysis*.  
Nama : Mutiara Shinta Andini, S.E.  
NIP : 199310232019032005  
NDH : 09  
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama  
Golongan/ Pangkat : Penata Muda Tk.I / III a  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 31 Agustus 2019

Peserta Diklat,



Mengetahui,

Coach

Menyetujui,

Mentor

Mutiara Shinta Andini, S.E.  
NIP. 199310232019032005



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.  
NIP. 196902082003121003

Rastri Paramita, S.E., M.M.  
NIP. 198001262014022002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyusun laporan aktualisasi tepat pada waktunya. Laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S. H., M. M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran
3. Rastri Paramita, S.E.,M.M., selaku mentor.
4. Agus Supriyono, S.S., M.A.P., selaku *coach*.

Laporan ini menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran dan kedudukan ASN. Laporan aktualisasi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Agustus 2019

Mutiara Shinta Andini

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Visi & Misi Unit Kerja, Struktur Organisasi, dan Tusi Analis APBN .....	2
2. Kondisi Saat Ini .....	5
3. Kondisi Yang Diharapkan .....	7
4. Identifikasi Isu .....	8
5. Teknik Analisis USG.....	10
6. Gagasan Pemecahan Isu .....	12
B.Tujuan.....	13
C.Manfaat.....	13
BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	14
A. Rancangan Aktualisasi.....	14
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan & Bukti Kegiatan .....	18
C. Stakeholders .....	33
D. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan .....	33
E. Time Schedule .....	34
BAB III PENUTUP .....	35
A. Kesimpulan .....	35
B. Saran .....	35

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Analisis USG.....	11
Tabel 2 Rancangan Aktualisasi .....	16
Tabel 3 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 1 .....	18
Tabel 4 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 2 .....	23
Tabel 5 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 3.....	27
Tabel 6 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 3.....	29
Tabel 7 Stakeholder Kegiatan.....	33
Tabel 8 Analisis Dampak .....	33
Tabel 9 Time Schedule .....	34

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran .....	3
Gambar 2 Ilustrasi Kondisi Saat Ini, Tahapan Kegiatan serta Kondisi yang Diharapkan.....	14
Gambar 3. Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 1 .....	18
Gambar 4 Dokumentasi Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran .....	20
Gambar 5 Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 2 .....	22
Gambar 6 Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 3 .....	27
Gambar 7 Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 3 .....	29
Gambar 8 Dokumentasi Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Presentasi Hasil Aktualisasi .....	30
Gambar 9 Pertumbuhan Ekonomi 2016–2019 (Persen, YoY).....	45
Gambar 10 Pertumbuhan Sektor Pembentuk PDB Berdasarkan Pendekatan Pengeluaran Tahun 2018-2019 (Persen, YoY).....	46

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

##### 1. Profil Organisasi

###### a. Pusat Kajian Anggaran

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam menjalankan fungsinya terutama terkait fungsi anggaran, maka dibentuklah Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit *supporting system* di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran;
- Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;

- Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran;
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BK .

b. Visi Misi Organisasi

**VISI**

*"Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel"*

**Pusat Kajian Anggaran yang profesional** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

**Pusat Kajian Anggaran yang andal** mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

**Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

**MISI**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- Memperkuat manajemen pengetahuan.
- Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

c. Struktur Organisasi

Sebagai sebuah organisasi tentunya Pusat Kajian Anggaran memiliki struktur organisasi. Pusat Kajian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan juga didukung oleh bagian Tata Usaha serta terdiri atas para Analis APBN. Susunan dari struktur organisasi Pusat Kajian Anggran adalah sebagai berikut:

*Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran*



d. Penjelasan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan

fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga lainnya;
- Menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;
- Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri;
- Menyusun Analisis Ringkas Cepat;
- Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;

- Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan; dan
- Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disetujui adalah seperti tabel di bawah ini :

**FORMULIR SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1	Nama	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. 19710911 199703 1 005	1	Nama	MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.			
2	NIP	Pembina Utama	2	NIP	19931023 201903 2 005			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Madya/ IV/d	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda/ III/a Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama			
4	Jabatan	Kepala Pusat Kajian Anggaran PUSAT KAJIAN ANGGARAN	4	Jabatan	PUSAT KAJIAN ANGGARAN			
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK*	TARGET					
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
1	Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD	0	5	dokumen	100	9	bulan	0

## 2. Kondisi Saat Ini

Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 413 Ayat (2), Undang-Undang MD3 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI. Pada Badan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran. Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi dari Bagian

Analisa APBN pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal (SETJEN) DPR RI.

Selama ini kinerja pelayanan dukungan keahlian fungsi anggaran dapat digambarkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan selama kurun waktu 2010-2015 melalui peran dari Biro Analisa APBN Setjen DPR RI) antara lain membuat analisis dan referensi dalam setiap pembahasan Siklus APBN, yang mencakup Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangannya, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan APBN, Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN, serta analisis dan referensi berdasarkan tematik APBN

Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan perjalanan organisasi yang baru berjalan sejak 2015 tersebut tentunya masih banyak ruang untuk terus melakukan evaluasi ataupun perbaikan dalam melaksanakan tugas fungsi. Kondisi-kondisi yang masih dapat ditingkatkan di Pusat Kajian Anggaran diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya kebermanfaatan produk analisis ringkas cepat di Pusat Kajian Anggaran dalam menstimulus Anggota Badan Anggaran DPR RI untuk mengonfirmasi ataupun mengkritisi pemerintah dalam rapat kerja sesuai siklus APBN.
- b. Rendahnya minat baca serta pemahaman Anggota DPR RI terhadap Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran Bentuk inovasi dalam hal menemukan alternatif penyajian atau media komunikasi yang menarik menjadi hal yang penting terutama di era digitalisasi saat ini dimana banyak sekali alternatif yang ditawarkan. Lebih lanjut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mata manusia

lebih cepat menangkap informasi yang tersaji dalam bentuk visual dibanding textual. Penggunaan media visual juga dapat menciptakan attensi lebih besar untuk membaca substansi yang disampaikan. Mengingat pentingnya metode penyajian terkait efektivitas penyampaian pesan pada pembaca, maka inovasi dalam hal penyajian menjadi hal yang patut untuk dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas produk kajian dalam mendukung kinerja Dewan. Salah satu jenis inovasi penyajian produk hasil kajian adalah infografis yang memuat representasi visual dengan lebih menarik.

- c. Belum optimalnya Standar pendekatan/model analisis yang digunakan dalam menetapkan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro setiap tahun. Dalam melakukan analisis, seorang analis sangat akrab dengan proses pengolahan data. Seringkali pula analis dihadapkan dengan jumlah data yang sangat banyak. Seringkali dijumpai jika dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data tersebut, ditemukan kesulitan akibat belum optimalnya penggunaan aplikasi pengolahan data. Salah satu penyebabnya adalah terkait pengetahuan cara menggunakan rumus Ms. Excel maupun pendekatan/model analisis statistik. Akibatnya, tidak jarang pengolahan data dilakukan dengan pendekatan/model analisis yang tidak baku. Hal ini jika tidak diatasi akan menghambat efisiensi pekerjaan analis

### **3. Kondisi yang diharapkan**

- a. Kebermanfaatan analisis ringkas cepat APBN di Pusat Kajian Anggaran dapat secara optimal menstimulus Anggota Badan Anggaran DPR RI untuk mengonfirmasi ataupun mengkritisi pemerintah dalam rapat kerja sesuai siklus APBN. Sehingga peran serta visi misi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi

- yang berfungsi sebagai sistem pendukung substansial secara otomatis juga ikut teroptimalkan.
- b. Peningkatan minat baca serta pemahaman Anggota DPR RI terhadap Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran. Sehingga untuk tujuan yang lebih luas dan komprehensif fungsi anggaran serta pengawasan yang dimiliki para Anggota dapat semakin kritis da berjalan dalam melakukan pembahasan dngan Pemerintah terkait kebijakan serta isu-isu dalam APBN.
  - c. Standar pendekatan/model analisis yang optimal dalam menetapkan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya. Khususnya di bidang kerja penulis yaitu Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar dan Ekonomi Makro dimana ingkup bahasan dalam bidang tersebut sangat membutuhkan pendekatan-pendekatan kerangka ekonomi makro dan permodelan ekonometrika untuk kebutuhan proyeksi-proyeksi data.

#### **4. Identifikasi Isu**

- a. **Belum Optimalnya Kebermanfaatan Produk Analisis Ringkas Cepat Di Pusat Kajian Anggaran Dalam Siklus APBN.**

Berdasarkan survei analisa kepuasan pengguna jasa yang rutin dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI Tahun 2018 terhadap produk-produk Pusat Kajian Anggaran dari 10 indikator penilaian, indikator kualitas *design* produk analisis APBN adalah indikator yang mendapatkan nilai indeks terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas *design* produk analisis termasuk analisis ringkas cepat APBN masih perlu dibenahi. Selanjutnya berdasarkan saran dan masukan dari responden terhimpun masukan terbanyak untuk meningkatkan produk-produk yang lebih tersimplifikasi dan menyuratkan secara langsung *output-output* pertanyaan yang bisa langsung dimanfaatkan anggota dalam mengkritisi kebijakan pemerintah

terkait APBN. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih ada aspek dari produk analisis Puat Kajian Anggaran yang perlu ditingkatkan demi meningkatkan kepuasan pengguna atau dengan kata lain kepuasan dalam hal substansial dapat dimaknai sebagai kebermanfaatan produk.

**b. Rendahnya Minat Baca serta Pemahaman Anggota DPR RI Terhadap Kajian Di Pusat Kajian Anggaran**

Berdasarkan penghimpunan saran masukan yang telah dihimpun dari pengguna jasa juga ditemukan bahwa minat baca anggota DPR RI terhadap produk kajian di pusat kajian anggaran masih minim. Jika minat baca Anggota sudah minim, maka akan lebih sulit bagi mereka untuk memahami isu ataupun substansi yang diangkat dalam produk-produk Pusat Kajian Anggaran. Ketika mereka tidak memahami isu, maka keaktifan keaktifan Anggota dalam mengkritisi Pemerintah tidak akan optimal.

Mengingat pentingnya metode penyajian terkait efektivitas penyampaian pesan pada pembaca, maka inovasi dalam hal penyajian menjadi hal yang patut untuk dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas produk kajian dalam mendukung kinerja Dewan. Salah satu jenis inovasi penyajian produk hasil kajian dalam bentuk infografis. Bentuk inovasi dalam hal menemukan alternatif format penyajian serta pendekatan komunikasi yang menarik menjadi hal yang penting terutama di era digitalisasi saat ini dimana banyak sekali alternatif yang ditawarkan. Lebih lanjut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mata manusia lebih cepat menangkap informasi yang tersaji dalam bentuk visual dibanding tekstual. Penggunaan media yang menarik secara visual juga dapat menciptakan attensi lebih besar untuk membaca substansi yang disampaikan. Selain itu, Mc. Luhan (1996) menyatakan "*Medium is a Message*" bahwa media lebih penting dari pesan yang disampaikan oleh media tersebut.

**c. Belum Optimalnya Standar Pendekatan/Model Analisis Yang Digunakan Dalam Menetapkan Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Setiap Tahun**

Dalam melakukan analisis, seorang analis sangat akrab dengan proses pengolahan data. Seringkali pula analis dihadapkan dengan jumlah data yang sangat banyak. Seringkali dijumpai jika dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data tersebut, ditemukan kesulitan akibat belum optimalnya penggunaan aplikasi pengolahan data. Salah satu penyebabnya adalah terkait pengetahuan cara menggunakan rumus Microsoft Excel maupun pendekatan/model analisis statistik. Akibatnya, tidak jarang pengolahan data dilakukan dengan pendekatan/model analisis yang tidak baku. Hal ini jika tidak diatasi akan menghambat efisiensi pekerjaan analis. Khususnyadi bidang kerja penulis yang merupakan Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dimana dalam memproyeksi data sangat erat kaitannya dengan pendekatan permodelan statistik.

Untuk mengatasi hal tersebut, umumnya para analis akan mendapatkan pendampingan-pendampingan berupa pelatihan, workshop ataupun seminar teknik-teknik serta pendekatan/model analisis yang biasa dilakukan instansi-instansi terkait lain seperti Bank Indonesia, Bank Dunia, INDEF, serta institusi terkait lainnya.

## **5. Teknik Analisis USG**

Berdasarkan identifikasi isu yang telah dilakukan, maka dapat disusun analisis menggunakan teknik USG dengan matriks sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis USG

No	ISU	U	S	G	Total	Ranking
1	Belum Optimalnya Kebermanfaatan Produk Analisis Ringkas Cepat Di Pusat Kajian Anggaran Dalam Siklus APBN.	5	4	4	13	1
2	Rendahnya Minat Baca serta Pemahaman Anggota DPR RI Terhadap Kajian Di Pusat Kajian Anggaran.	4	4	4	12	2
3	Belum Optimalnya Standar Pendekatan/Model Analisis Yang Digunakan Dalam Menetapkan Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Setiap Tahun.	4	3	3	10	3

Berdasarkan tabel USG di atas isu terpilih yang akan menjadi prioritas adalah **isu 1** terkait "**Belum Optimalnya Kebermanfaatan Produk Analisis Ringkas Cepat Di Pusat Kajian Anggaran Dalam Siklus APBN**". Isu tersebut memiliki nilai keseluruhan *Urgency, Seriousness, dan Growth* tertinggi.

- a) Isu 1 memperoleh Nilai ***Urgency 5*** yang artinya **sangat penting** untuk diatasi karena terkait dengan **optimalisasi peran/fungsi** unit kerja sebagai sistem pendukung substansi terkait APBN agar Anggota dapat menjadi lebih kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya. Selain itu isu pertama ini memiliki keterkaitan dengan isu 2 dan 3, dimana isu 1 merupakan akar permasalahan dari kombinasi ketiga isu utama tersebut.
- b) Aspek ***Seriousness*** memperoleh **nilai 4** karena isu 1 tergolong serius untuk diatasi karena kebermanfaatan output jika tidak optimal akan mempengaruhi reputasi serta keberlanjutan unit kerja Pusat Kajian Anggaran yang masih dapat dikatakan baru. Nilai kebermanfaatan ini juga merupakan *proxy* dari kepuasan para pengguna, sehingga kebermanfaatan yang belum optimal bisa merepresentasikan kualitas/fungsi yang tidak optimal dari Pusat Kajian Anggaran. Dibandingkan dengan isu 2 dan isu 3, isu 1 memiliki ruang lingkup yang lebih luas untuk keseluruhan bidang

dan merupakan sisi yang dapat diperbaiki dari sisi Pusat Kajian Anggaran sendiri.

- c) Aspek **Growth bernilai 4** karena isu 1 memiliki potensi untuk menjadi perkembangan akar permasalahan baru yakni akan menstimulus isu 2 yakni **minimnya minat baca** anggota terhadap produk-produk Pusat Kajian Anggaran yang akan memiliki efek domino terhadap keberlanjutan serta reputasi unit kerja Pusat Kajian Anggaran. Dengan kata lain, isu 1 menjadi dasar terhadap permasalahan isu 2 dan isu 3 yang harus diatasi terlebih dahulu untuk mencegah perkembangan masalah yang lebih luas.

## 6. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan isu/permasalahan di Pusat Kajian Anggaran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam rancangan aktualisasi ini penulis mengagas kegiatan Optimalisasi Kebermanfaatan Analisis Ringkas Cepat APBN melalui Infografis *Critical View Analysis*. Ouput *Critical View Analysis* adalah Analisis Ringkas Cepat dengan format serta *template desain* yang lebih menarik dan tersimplifikasi dalam bentuk infografis dua halaman kertas A4 (timbal balik). Infografis *Critical View Analysis* adalah analisis ringkas cepat terkait suatu isu aktual dalam APBN yang berfungsi sebagai suplemen mendampingi produk analisis yang terbit sesuai siklus APBN. Sesuai kebutuhan para anggota DPR RI, Dimana struktur isi tulisannya terbagi ke-dalam tiga bagian yaitu 1.) Perkembangan Data Singkat terkait Isu; 2.) Tantangan yang dihadapi terkait Isu, 3.) Pertanyaan Kritis terkait isu. Pada bagian ketiga ini akan menjabarkan poin-poin pertanyaan serta *highlight* perihal apa saja yang penting untuk dikonfirmasikan kepada pemerintah terkait APBN. Sehingga diharapkan secara lebih luas kebermanfaatan produk yang dihasilkan Pusat Kajian Anggaran ini dapat menstimulus anggota untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, khususnya para Anggota Badan Anggaran.

## **B. TUJUAN GAGASAN PEMECAHAN ISU**

Tujuan dari gagasan kegiatan Optimalisasi Kbermanfaatan analisis ringkas cepat APBN dengan *Critical View Analysis* berbentuk Infografis yang tersimplifikasi, esensial, serta menarik adalah untuk mendorong keaktifan Anggota dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan dalam APBN. Melalui penyediaan dukungan substansial perihal isu-isu aktual yang terkait langsung dengan APBN. Sehingga standar pemahaman serta pengetahuan anggota mengenai isu/masalah APBN dapat selalu terbarukan.

## **C. MANFAAT**

### **2. Internal**

- a) Optimalisasi peran fungsi keahlian para Analis APBN.
- b) Peningkatan reputasi unit kerja Pusat Kajian Anggaran di mata para *stake holder* utamanya Anggota DPR dan Publik.
- c) Perwujudan akuntabilitas serta profesionalitas unit kerja.

### **3. Eksternal**

- a) Meningkatkan ketergunaan produk analisis yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran terhadap keaktifan para Anggota Dewan khususnya Badan Anggaran dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran terhadap kebijakan pemerintah.
- b) Peningkatan minat baca serta pemahaman para anggota terhadap produk-produk Pusat Kajian Anggaran.
- c) Memantik optimalisasi fungsi pendampingan Pusat Kajian anggaran kepada Badan Anggaran serta AKD lainnya terkait APBN.

## BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI

### A. RANCANGAN AKTUALISASI

Gambar 2 Ilustrasi Kondisi Saat Ini, Tahapan Kegiatan serta Kondisi yang Diharapkan



Unit Kerja

: Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Identifikasi Isu

: 1. Belum optimalnya kebermanfaatan produk analisis ringkas cepat di Pusat Kajian Anggaran dalam siklus APBN.

2. Rendahnya minat baca serta pemahaman Anggota DPR RI terhadap Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran.
3. Belum optimalnya standar pendekatan/model analisis yang digunakan dalam menetapkan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro setiap tahun..

**Isu yang Diangkat** : Belum optimalnya kebermanfaatan produk analisis ringkas cepat di Pusat Kajian Anggaran dalam siklus APBN.

**Gagasan Pemecahan Isu** : Optimalisasi kebermanfaatan Analisis Ringkas Cepat dalam siklus APBN melalui Infografis *Critical Review Analysis*

*Tabel 2 Rancangan Aktualisasi*

	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Konsultasi dengan Kordinator Bidang, Kepala Pusat Kajian Anggaran .	1.Rapat konsultasi dengan Koordinator Bidang 2.Rapat konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran. 3.Konfirmasi agenda ke bagian TU	1. Catatan hasil Konsultasi 2. Laporan Singkat rapat Konsultasi 3. Catatan Hasil Komunikasi dengan TU	<b>Nilai Dasar PNS:</b> 1. Akuntabilitas (transparansi, kejelasan) 2. Nasionalisme (kerjasama, kepentingan bersama) 3. Etika Publik (berkomunikasi dengan baik) <b>Peran dan Kedudukan:</b> 1. Manajemen ASN (komunikasi dan konfirmasi.)	1.Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi misi organisasi yaitu menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel. 2.Rangkaian kegiatan ini mendukung misi organisasi yaitu: Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses	1. Akuntabel 2. Profesional
2	Penyusunan Anaisis.	1. Pengumpulan Data Sekunder Kuantitatif 2. Pengumpulan Data Sekunder Kualitatif 3. Penyusunan Substansi	1. Daftar Inventaris Data Kuantitatif 2. Daftar Pustaka 3. Draft Analisis	<b>Nilai Dasar PNS:</b> 1. Akuntabilitas (tanggung jawab, kejelasan) 2. Komitmen mutu (efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu) 3. Etika Publik (integritas dalam penulisan) <b>Peran dan Kedudukan:</b> 1. Manajemen ASN (bekerja keahlian) sesuai	1. Akuntabel 2. Profesional 3. Integritas	

	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
3	Pembuatan Infografis	1. Menyusun desain template infografis 2. Mengerjakan pembuatan infografis. 3. Proses <i>Editing</i> .	1. Template Infografis 2. Draft Infografis 3. Draft Infografis	<b>Nilai Dasar PNS:</b> 1. Akuntabilitas (tanggung jawab, kejelasan) 2. Nasionalisme (kepentingan bersama) 3. Etika publik (berkomunikasi dengan baik) 4. Komitmen mutu (efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu) <b>Peran dan Kedudukan:</b> 1. Manajemen ASN (bekerja sesuai keahlian)	pelaksanaan fungsi anggaran Dewan; Memperkuat manajemen pengetahuan dan Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN	1. Akuntabel 2. Profesional 3. Integritas
4	Sosialisasi, Evaluasi Dan Penyempurnaan Produk Di Internal Pusat Kajian Anggaran.	1. Presentasi hasil di Pusat Kajian Anggaran. 2. Pengumpulan saran dan masukan perbaikan produk. 3. Melakukan revisi dan penggerjaan Laporan Hasil.	1. Bahan Presentasi 2. Catatan Masukan/Saran Perbaikan 3. Draft Akhir dan Laporan Aktualisasi	<b>Nilai Dasar PNS::</b> 1. Komitmen mutu (efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu)		1. Profesional

## B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

### 1. Kegiatan Konsultasi

Gambar 3. Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 1



Tabel 3 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 1

No	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Manajemen ASN	Akuntabel
2	Nasionalisme		Profesional
3	Etika Publik		

Kegiatan satu merupakan serangkaian tahapan konsultasi serta konfirmasi dengan pimpinan, tata usaha serta koordinator bidang terkait tema/topik bahasan, format/struktur tulisan, serta konsep tampilan yang akan diangkat dalam *output*. Tujuan dari kegiatan ini adalah menentukan tema serta topik yang akan diangkat dalam *output* infografis serta mengonfirmasi dan mengomunikasikan agenda tahapan kegiatan yang akan dilakukan selama satu bulan ke depan kepada koordinator bidang, Kepala Pusat, serta Tata Usaha.

#### 1) Tahapan kegiatan dan *output*

Tahapan kegiatan disini terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Konsultasi dengan Koordinator Bidang selaku mentor terkait format/struktur tulisan, desain, tema serta topik yang akan

diangkat dalam analisis ringkas cepat yang akan diaktualisasikan melalui media komunikasi pertemuan langsung pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019. Konsultasi dengan koordinator bidang ini merupakan tahapan kegiatan awal untuk selanjutnya dilaksanakan konsultasi dengan pimpinan Kepala Pusat Kajian Anggaran serta TU. Output dari tahapan kegiatan ini adalah adanya Catatan hasil rapat konsultasi. Dari tahapan ini dihasilkan kesepakatan bahwa output yang dihasilkan adalah infografis *critical review analysis* dengan format tulisan sebanyak dua halaman A4 timbal balik, dan secara garis besar tersusun dari tiga sub-bahasan yaitu: perkembangan data isu terkait; tantangan yang dihadapi terkait isu; serta pertanyaan kritis terkait isu.

- b. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran pada hari Selasa tanggal 23 juli 2019, Tahapan kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran ini merupakan komunikasi lanjutan sebagai bentuk akuntabilitas penulis dalam proses melaksanakan aktualisasi. Melalui tapan ini penulis menyampaikan gambaran umum mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta output akhir yang akan dihasilkan melalui aktualisasi ini. Kemudian dari tahapan yang dilakukan ini penulis memperoleh dukungan serta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan menghasilkan output akhir berupa infografis *critical view analysis*. Output dari tahapan kegiatan ini adalah adanya laporan singkat rapat konsultasi dengan pimpinan.

*Gambar 4 Dokumentasi Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran*



- c. Komunikasi dengan Tata Usaha terkait agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Dimana sepakati bahwa kegiatan 3 atau sosialisasi evaluasi sekaligus penyempurnaan produk kepada internal Pusat Kajian anggaran dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 dengan agenda presentasi hasil kepada pusat kajian anggaran yang nantinya akan dihadiri oleh para analis APBN, coordinator bidang serta Kepala Pusat Kajian Anggraran. Output dari tahapan kegiatan ini adalah catatan hasil komunikasi agenda kegiatan dengan TU yang menjabarkan pokok-pokok hasil konsultasi yang telah dilakukan.
- 2) Keterkaitan substansi mata pelatihan
- Dari seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan pada kegiatan 1 dapat kita temukan nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN

yang terkandung dari rangkaian tahapan kegiatan pada kegiatan dimana nilai dasar ASN yang sangat menonjol dari tahapan kegiatan ini yaitu:

a. Akuntabilitas

Dimana diharapkan seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan tercipta transparansi kejelasan komunikasi serta koordinasi yang merefleksikan nilai akuntabilitas unit kerja.

b. Etika Publik

Bagaimana pendekatan komunikasi dengan atasan rekan kerja senior staf tata usaha juga wajib diterapkan etika publik, berkomunikasi dengan baik bagaimana berpenampilan serta yaitu Akuntabel dan Profesional

c. Nasionalisme

Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2) permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat kebijaksanaan. Penghayatan terhadap nilai-nilai permusyawaratan ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Adanya mentalitas yang mengutamakan kepentingan umum ini memudahkan dalam menemukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan bersama. Untuk itu, dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Demokrasi permusyawaratan juga menghendaki adanya semangat para penyelenggara negara. Idealitas sistem demokrasi yang dirancang sangat ditentukan oleh semangat para penyelenggara negara untuk menyesuaikan sikapnya menurut nilai-nilai Pancasila, begitu pula apa yang diterapkan dalam pelaksanaan konsultasi dan penentuan topik bahasan yang diangkat ini.

d. Manajemen ASN

Dalam kegiatan satu juga mencerminkan manajemen ASN yang memiliki nilai-nilai dasar komunikasi serta konfirmasi dalam menjalankan tugas/fungsi. Termasuk dalam mendiskusikan tema dan topik yang sesuai dengan bidang tugas dan kebutuhan siklus sebagai topik yang aktual.

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat dua nilai organisasi yang menonjol terkait dengan kegiatan konsultasi ini, yaitu:

a. Akuntabel

Dimana diharapkan seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan tercipta transparansi kejelasan komunikasi serta koordinasi yang merefleksikan nilai tanggung jawab di setiap lapisan dalam unit kerja.

b. Profesional

Dalam melaksanakan proses-proses pengambilan keputusan tanpa konflik kepentingan dan berdasarkan kepada kebutuhan substansi professional yang juga mengacu kepada penerapan nilai-nilai dasar organisasi Pusat Kajian Aggaran serta Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tersebut.

## 2. Kegiatan Penyusunan Output

Gambar 5 Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 2



*Tabel 4 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 2*

No	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Manajemen ASN	Akuntabel
2	Komitmen Mutu		Profesional
3	Etika Publik		Integritas

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penyusunan draft analisis ringkas cepat. Kegiatan kedua ini adalah kegiatan inti dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Draft Analisis yang dihasilkan mengangkat topik pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN, dengan struktur tulisan secara garis besar meliputi: Perkembangan data terkait isu; Tantangan yang dihadapi terkait isu; serta pertanyaan kritis terkait isu. Tujuan dari kegiatan ini dapat dihasilkan analisis ringkas mengenai isu-isu APBN dengan nilai guna optimal bagi para anggota Badan Anggaran dalam membahas maupun mengkritisi kebijakan Pemerintah.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada kegiatan penyusunan produk disini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

a. Penghimpunan data-data pendukung sekunder kuantitatif

Penghimpunan data-data pendukung sekunder kuantitatif dari beberapa sumber, diantaranya: Bank Indonesia, BPS, serta Kementerian Keuangan. Penghimpunan data sekunder kuantitatif ini selanjutnya akan dijadikan referensi atau penguatan argumentasi untuk menarik tantangan serat pertanyaan-pertanyaan kritis yang akan disususun berikutnya. Selain itu pada bagian awal tulisan mengenai perkembangan data juga akan ditampilkan data-data-data yang dihasilkan dari tahapan kegiatan ini. Kemudian dilakukan juga penghimpunan data-data

penunjang sekunder kualitatif analisis sebagai dasar argumentasi dari beberapa literatur. Output dari tahapan kegiatan ini adalah data-data pendukung sekunder kuantitatif

b. Penghimpunan data-data penunjang sekunder kualitatif

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memperkuat substansi bahasan tahapan sebagai dasar argumentasi yang lebih kokoh dalam menyampaikan hasil analisis buah pikiran dari beberapa literatur. Data atau literature yang telah dihimpun terkait pertumbuhan ekonomi juga dalam rangka penguatan kerangka berpikir tulisan sehingga output yang dihasilkan dapat menghasilkan substansi yang sistematis dan reliabel. Output dari tahapan kegiatan ini adalah daftar pustaka.

c. Penyusunan Substansi

Setelah mengumpulkan data-data pendukung sekunder kuantitatif dan kualitatif yang telah dirasa cukup, maka selanjutnya tahapan yang dilakukan adalah menyusun kerangka pikir tulisan serta penyusunan substansi produk sesuai tema dan topik yang diangkat. Melalui tahapan kegiatan ini dilakukan juga kompilasi benang merah antara data serta isu sehingga dapat dihasilkan perspektif analisis kritis terhadap isu pertumbuhan Indonesia tahun yang sedang berjalan 2019 serta tahun yang akan datang 2020. Selanjutnya dilakukan penarikan rekomendasi berupa poin-poin pertanyaan kritis ataupun beberapa *highlight* yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah terkait isu pertumbuhan dalam APBN. Output dari tahapan ini adalah draft analisis.

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat tiga nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan pengolahan dokumen ini, yaitu:

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabel disini maksudnya dalam prinsip penggerjaan produk penulis harus mampu bertanggung-jawab serta mempertanggungjawabkan terkait apapun yang telah dituliskan dan dituangkan dalam tulisan tersebut.

b. Komitmen Mutu

Dalam melakukan kegiatan penyusunan produk telah disepakati format ataupun struktur penulisan yang harus sesuai dengan aturan-aturan baku dalam penulisan analisis. Hal tersebut memerlukan penerapan nilai komitmen mutu dalam pelaksanaan kegiatan, dimana baik secara redaksional ataupun substansial penulis wajib memenuhi standar yang berlaku.

c. Etika Publik

Prinsip etika publik dalam penyusunan produk juga perlu diterapkan, bagaimana dalam memilih kata dalam tulisan, dalam mengungkapkan rekomendasi berupa saran kritis yang harus memperhatikan pendekatan atau pilihan-pilihan kata lugas namun tidak provokatif ataupun mengundang ambiguitas.

d. Manajemen ASN

Melalui pelaksanaan tahapan kegiatan ini penulis melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas/fungsi serta jabatan fungsional yakni Analis APBN. Melalui kegiatan ini juga penulis melaksanakan kegiatan yang selaras dengan visi-misi organisasi tempat penulis bekerja yakni Pusat Kajian Anggaran. Dalam pelaksanaannya juga menerapkan nilai-nilai dasar profesionalitas yang merupakan tujuan dari manajemen ASN.

e. Pelayanan Publik

Dalam tahapan kegiatan ini dihasilkan analisis ringkas cepat yang bertujuan untuk mendukung fungsi anggaran serta pengawasan Badan Anggaran serta menstimulus keaktifan para anggota dalam mengkonfirmasi serta mengkritisi kebijakan

pemerintah terkait APBN. Oleh karena itu, tahapan kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi pelayanan publik yang dilaksanakan penulis sebagai *supporting system* keahlian.

### 3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan penyusunan produk ini, yaitu:

#### a. Akuntabel

Prinsip akuntabel disini maksudnya dalam prinsip penggeraan produk penulis harus mampu bertanggung-jawab serta mempertanggungjawabkan terkait apapun yang telah dituliskan dan dituangkan dalam tulisan tersebut.

#### b. Profesional

Dalam melakukan kegiatan penyusunan produk analisisi digunakan teori-teori atau sense dari keilmuan tertentu yang dalam hal ini ilmu ekonomi terkait APBN. Oleh karena itu dalam penggeraannya sejalan dengan data-data terkait yang berkembang yang didukung oleh dasar teori yang telah dimiliki oleh penulis sesuai keahliannya, *disingilah nilai professional diterapkan*.

#### c. Integritas

Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan produk ini harus diterapkan nilai integritas dalam merumuskan perspektif terkait isu, agar rekomendasi berupa poin-poin pertanyaan kritis menjadi objektif dan bebas dan *conflict of interest*.

### 3. Kegiatan Pembuatan Infografis

Gambar 6 Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 3



Tabel 5 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 3

No	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1	Komitmen Mutu	-	Profesional

Setelah melakukan penyusunan draft analisis dalam bentuk tulisan selanjutnya adalah mengkonversi produk tulisan tersebut ke dalam bentuk infografis. Pada kegiatan ini penulis melakukan pemilihan template desain infografis yang akan digunakan, kemudian membuat infografis serta melakukan penyempuranaan infografis. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat produk analisis yang sudah dihasilkan menjadi bentuk yang lebih menarik dan harapannya lebih mudah dipahami sehingga kebermanfaatannya produk dapat optimal.

#### 1) Tahapan kegiatan dan output

Pada kegiatan pembuatan Infografis terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

##### a. Menentukan template infografis yang akan digunakan

Pada tahapan kegiatan ini akan ditentukan template atau bentuk, tata letak yang akan dituangkan ke dalam infografis produk. Output dari tahapan kegiatan ini adalah sudah ditentukannya tata letak serta template infografis yang akan digunakan.

b. Pembuatan Infografis

Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah melaksanakan pembuatan infografis setelah memilih tata letak serta tema yang akan digunakan dalam rangka menghasilkan produk analisis yang lebih menarik. Output dari tahapan kegiatan ini adalah Draft Infografis 1.

c. Proses *Editing*

Dalam tahapan kegiatan ini memberikan ruang kepada penulis untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam proses pembuatan infografis tersebut. Output yang dihasilkan adalah *draft Infografis Edited*.

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat satu nilai dasar ASN yang sangat menonjol terkait dengan kegiatan Konversi Produk menjadi Infografis ini, yaitu:

a. Komitmen Mutu

Proses konversi produk kepada bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami merupakan implementasi dari aspek komitmen mutu yang dilakukan penulis. Dimana dalam tujuan pengaktualisasian klegiatan ini adalah diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi pada produk-produk analisis Pusat Kajian Anggaran yang belum optimal kebermanfaatannya.

3) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat satu niali organisasi yang paling dominan dengan kegiatan konversi produk ini, yaitu:

a. Profesional

Dengan melakukan rangkaian kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan mutu pelayanan organisasi kepaad pengguna dibutuhkan profesionalisme penulis untuk

bersungguh-sungguh memberikan produk analisis terbaik, agar tujuan yang ditargetkan dapat tercapai.

#### 4. Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Hasil

Gambar 7 Tahapan Kegiatan serta Output yang dihasilkan dari Kegiatan 3



Tabel 6 Nilai-Nilai yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan 3

No	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Manajemen ASN	Akuntabel
2	Nasionalisme		Profesional
3	Etika Publik		Integritas
4	Komitmen Mutu		

Setelah melakukan konversi produk analisis ke dalam bentuk infografis, maka selanjutnya adalah sosialisasi dan evaluasi kepada Pusat Kajian Anggaran serta pembuatan laporan hasil seluruh kegiatan aktualisasi. Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi ini adalah serangkaian tahapan kegiatan yang bertujuan menghimpun saran/masukan perbaikan untuk substansi produk dari internal unit organisasi Pusat kajian Anggaran, dalam rangka optimalisasi kualitas produk.

##### 1) Tahapan kegiatan dan output

Terdapat tiga tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini, meliputi:

a. Presentasi hasil

Presentasi hasil produk analisisi ringkas yang telah disusun dari kegiatan dua kepada internal Pusat Kajian Anggaran berupa pemaparan singkat produk melalui media *power point*. Dalam tahapan kegiatan ini dijelaskan garis besar isu, perkembangan data serta rekomendasi berupa poin kritis terkait isu yang diangkat. Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah mensosialisasikan produk analisis ringkas yang dihasilkan dengan penamaan dan format baru.

**Gambar 8 Dokumentasi Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Presentasi Hasil Aktualisasi**



b. Penghimpunan Saran dan Masukan perbaikan

Tujuan mengirimkan Penghimpunan Saran dan Masukan perbaikan adalah menyempurnakan serta optimalisasi kualitas substansial dari produk analisisi, sebagai salah satu bentuk komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran sesuai ISO 9001 2015. Output dari kegiatan ini adalah laporan singkat rapat yang

menyantumkan notulensi saran dan masukan/tanggapan dari forum rapat.

- c. Melakukan revisi sesuai saran/masukan serta Pembuatan Laporan hasil kegiatan.

Tujuan dari tahapan kegiatan revisi ini adalah melaksanakan perbaikan serta memperkaya sisi substansi produk untuk nantinya dituangkan ke dalam bentuk infografis serta sebagai bagian pertanggungjawaban dan pengumpulan *evidence* pelaksanaan kegiatan, yang kemudian bisa dijadikan dasar evaluasi keseluruhan kegiatan. Output dari tahapan ini adalah infografis akhir serta laporan Hasil Aktualisasi.

- 1) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat satu nilai dasar ASN yang sangat menonjol terkait dengan kegiatan Konversi Produk menjadi Infografis ini, yaitu:

- a. Akuntabilitas

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi serta penyusunan laporan akhir ini sebagai salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban penulis dalam mengaktualisasikan output, dimana hal tersebut selaras dengan nilai dasar akuntabilitas.

- b. Nasionalisme

Tahapan kegiatan sosialisasi dan evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang memerlukan nilai dasar nasionalisme yang berdasarkan kepada Pancasila, khususnya pada sila ke-4. Proses musyawarah, diskusi dalam mengkolaborasi ide-ide perbaikan, bagaimana cara menyampaikan saran/masukan serta cara menanggapi saran/masukan tersebut demi merefleksikan permusyawaratan penuh hikmat kebijaksanaan.

- c. Etika Publik

Prinsip etika publik dalam mempresentasiakan hasil kegiatan juga diterapkan dalam seluruh tahapan kegiatan. Bagaimana dalam

memilih kata dalam berkomunikasi mengenai produk, dalam berpenampilan, serta dalam pendekatan penyampaian produk yang bebas dari konflik kepentingan.

d. Komitmen Mutu

Seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi bertujuan untuk memastikan kebermanfaatan produk oleh Anggota Badan Anggaran merupakan bagian bentuk komitmen mutu yang dilakukan oleh penulis. Sebagai bentuk komitmen mutu yang dilakukan oleh penulis sebagai bagian dari Pusat Kajian Anggaran sesuai dengan ISO 9001 2015.

e. Manajemen ASN

Dalam kegiatan akhir ini juga mencerminkan manajemen ASN yang memiliki nilai-nilai dasar komunikasi serta konfirmasi dalam menjalankan tugas/fungsi. Termasuk dalam menghimpun masukan/saran perbaikan output yang dihasilkan berdasarkan topik yang sesuai dengan bidang tugas dan kebutuhan siklus APBN.

2) Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat satu nilai organisasi yang paling dominan dengan kegiatan distribusi produk ini, yaitu:

a. Akuntabel

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini sebagai salah satu bentuk keterbukaan akan ide-ide serta saran/masukan dari forum kepada penulis dalam mengaktualisasikan produk, dimana hal tersebut selaras dengan nilai dasar akuntabilitas dan sikap/perilaku akuntabel.

b. Profesional

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini didasari oleh kesiapan argumentasi serta data-data penunjang dalam

mengakomodasi tanggapan, saran ataupun masukan dalam forum. Teori-teori atau *sense* dari keilmuan ilmu ekonomi terkait APBN juga digunakan sesuai dengan keahlian penulis.

c. Integritas

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini harus diterapkan nilai integritas dalam merumuskan perspektif terkait argumentasi isu, agar rekomendasi berupa poin-poin pertanyaan kritis menjadi objektif dan bebas dan *conflict of interest*.

### C. STAKEHOLDER (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

*Tabel 7 Stakeholder Kegiatan*

Internal	Eksternal
Kepala Pusat kajian Anggaran	Sekretariat Banggar
Staf TU	Anggota Banggar
Analis APBN	Publik

### D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

*Tabel 8 Analisis Dampak*

No	Kegiatan	Dampak Jika Kegiatan Tidak dilakukan
1	Konsultasi	Ketidak-paduan informasi serta komunikasi antar <i>stakeholder</i> dengan penulis serta kurang optimalnya kesesuaian produk dengan isu-isu yang dibutuhkan.
2	Penyusunan Draft Analisis	Tidak terlaksananya aktualisasi.
3	Pembuatan Infografis	Hilangnya kesempatan optimalisasi kualitas produk dengan adanya evaluasi serta masukan.
4	Sosialisasi, evaluasi serta Pembuatan Laporan Hasil	Tidak tersampaikannya esensi keseluruhan kegiatan dalam menjalankan kegiatan.

#### **E. TIME SCHEDULE**

### **Tabel 9 Time Schedule**

### Keterangan:

## : Rencana

## : Realisasi

 : Akhir Pekan

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Hasil kegiatan aktualisasi merupakan pelaksanaan rancangan aktualisasi yang telah disusun melalui beberapa proses. Proses yang dilakukan mulai dari memilih isu prioritas, menelaah latar belakang, tujuan dan manfaat dari isu yang diangkat serta melakukan analisa dengan menggunakan teknis USG. Output pelaksanaan hasil aktualisasi ini yaitu Infografis *Critical View Analysis* sebagai output yang bersifat suplementer terhadap analisis dalam siklus APBN dengan tampilan yang lebih menarik dan diharapkan lebih mudah dipahami oleh para pengguna serta secara tidak langsung dapat meningkatkan peran pusat kajian anggaran dalam menstimulus keaktifan para Anggota untuk mengkritisi dan memberikan masukan terkait APBN kepada Pemerintah.

#### B. SARAN

Kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan penulis yang menghasilkan output infografis analisis ringkas cepat sebagai komplementer produk analisis dalam siklus APBN hendaknya didukung oleh seluruh *stake holder* yang terlibat. Sehingga kedepannya output ini bisa diperbaik dan didistribusikan sesuai dengan siklus APBN. Diharapkan output yang dihasilkan dapat meningkatkan kebermanfaatan dan ketertarikan para anggota untuk menggunakan produk-produk pusat Kajian Anggaran secara optimal. Sehingga tujuan serta visi-misi yang telah dicanangkan dapat tercapai.

## **LAMPIRAN KEGIATAN 1**

## Lampiran 1.1 Catatan Hasil Konsultasi dengan Mentor



**Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman:  
puskajianggaran.dpr.go.id

### **CATATAN HASIL KONSULTASI CPNS DENGAN KOORDINATOR BIDANG**

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Senin, 22 Juli 2019
<u>Pukul</u>	:	08.30 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran 603 Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	Konsultasi Tema/Topik, Struktur Tulisan serta Format Output.
<u>Narasumber</u>	:	Rastri Paramita, S.E., M.M.

#### **1. PEMBUKAAN**

Agenda konsultasi mengenai rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan Mutiara Shinta Andini selaku calon Analis APBN Ahli Pertama hingga akhir Agustus 2019 mendatang dimulai pada pukul 08.30 WIB kepada Koordinator Bidang, Rastri Paramita, S.E., M.M. Secara garis besar, bahasan konsultasi yang dilaksanakan adalah mengkomunikasikan tema, konsep, serta visibilitas mekanisme distribusi produk Infografis Analisis Ringkas Cepat suplemen APBN yang akan diaktualisasikan oleh calon Analis.

#### **2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN**

##### **a. Agenda Kegiatan Aktualisasi**

Mengkomunikasikan kepada kepala pusat bahwa selama 30 hari ke depan calon analis akan melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Secara garis besar nanti akan mengadakan sosialisasi dan evaluasi output di minggu ke-4 bulan agustus 2019.

##### **b. Penentuan Tema, Topik Bahasan**

Dikomunikasikan bahwa berdasarkan hasil diskusi serta arahan koordinator bidang, disarankan untuk membuat dua topik bahasan yaitu **Pertumbuhan Ekonomi** karena dianggap relevan dengan siklus bahasan APBN Induk. Fokus bahasan dalam tema pertumbuhan ekonomi adalah menggali isu-isu pertumbuhan ekonomi secara struktural ataupun sektoral.

#### **3. PENUTUP**

Demikianlah acara konsultasi aktualisasi Mutiara Shinta Andini dengan Koordinator Bidang, rapat ditutup pukul 10.00 wib.

## Lampiran 1.2 Laporan Singkat Konsultasi dengan Kepala Pusat



**Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

### **LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Selasa, 23 Juli 2019
<u>Pukul</u>	:	09.00 s/d 11.00 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
<u>Acara</u>	:	Konsultasi Tema, Konsep, Serta Mekanisme Distribusi Produk Infografis Ringkasan Eksekutif APBN dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.
<u>Pimpinan</u>	:	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

#### **1. PEMBUKAAN**

Agenda konsultasi mengenai rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan Mutiara Shinta Andini selaku calon Analis APBN Ahli Pertama hingga akhir Agustus 2019 mendatang dimulai pada pukul 09.00 WIB kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr.Asep Ahmad Saefuloh,S.E.,M.Si. Secara garis besar, bahasan konsultasi yang dilaksanakan adalah mengkomunikasikan tema, konsep, serta visibilitas mekanisme distribusi produk Infografis Analisis Ringkas Cepat suplemen APBN yang akan diaktualisasikan oleh calon Analis.

#### **2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN**

##### **a. Agenda Kegiatan Aktualisasi**

Mengkomunikasikan kepada kepala pusat bahwa selama 30 hari ke depan calon analis akan melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Secara garis besar nanti akan mengadakan sosialisasi dan evaluasi output di minggu ke-4 bulan agustus 2019.

##### **b. Penentuan Tema, Topik Bahasan**

Dikomunikasikan bahwa berdasarkan hasil diskusi serta arahan koordinator bidang, disarankan untuk membuat dua topik bahasan yaitu Petumbuhan Ekonomi karena dianggap relevan dengan siklus bahasan APBN Induk. Fokus bahasan dalam tema pertumbuhan ekonomi adalah menggali isu-isu pertumbuhan ekonomi secara struktural ataupun sektoral.

c. *Konfirmasi Visibilitas Pencetakan Serta Mekanisme Distribusi Produk*

Selanjutnya untuk mekanisme pencetakan ke dalam bentuk infografis telah disetujui oleh Kepala Pusat yang kemudian nanti pendistribusian beberapa sampel output akan didampingi oleh calon analis bersama Koordinator Bidang.

**3. PENUTUP**

Demikianlah acara konsultasi aktualisasi Mutiara Shinta Andini dengan Kepala Pusat Kajian Angaran, rapat ditutup pukul 11.00 wib.

Mengetahui,  
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.SI  
NIP. 19710911 199703 1 005

## Lampiran 1.3 Catatan Hasil Komunikasi CPNS Dengan Bagian Tata Usaha



**Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

### **CATATAN HASIL KOMUNIKASI CPNS DENGAN BAGIAN TATA USAHA PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

<u>Hari,</u>	:	Senin, 23 Juli 2019
<u>Pukul</u>	:	10.00 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	Melakukan Komunikasi dengan Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran untuk mendapatkan tanggal konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.
<u>Narasumber</u>	:	Ibu Musbiyatun – Staff Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran

#### **3. PEMBUKAAN**

CPNS di Pusat Kajian Anggaran melakukan komunikasi dengan Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran dan menyampaikan maksud serta tujuannya yaitu ingin melakukan konsultasi dan meminta arahan dari Kepala Pusat Kajian Anggaran terkait Rancangan Aktualisasi yang sedang dilakukan oleh CPNS, sehingga CPNS bermaksud untuk meminta izin untuk menemui Kepala Pusat Kajian Anggaran. Komunikasi dilakukan pada hari Selasa, 22 Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB dengan Ibu Musbiyatun (Staff Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran).

#### **4. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN**

- CPNS menemui Bagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran Ibu Musbiyatun, dan menyampaikan maksud & tujuan CPNS, memohon izin untuk menemui

- Kepala Pusat Kajian Anggaran, serta menanyakan ketersediaan waktu dari Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk bisa ditemui;
- b. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, dipersilakan pada hari yang sama, Selasa 23 Juli 2019 untuk langsung menemui Bapak Kepala Pusat Kajian Anggaran.
  - c. Setelah selesai melaksanakan komunikasi dengan Kepala Pusat, CPNS mengkomunikasikan serta meminta izin kepada tata usaha untuk nanti menyelenggarakan kegiatan sosialisasi serta evaluasi hasil aktualisasi yang akan dilaksanakan pada Jumat, 23 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB.
  - d. Secara garis besar disampaikan agenda kegiatan CPN dengan beberapa rincian sbb:

No	Kegiatan	Jul 2019					Aug 2019					Keterangan	
		Week					Week						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Konsultasi serta penetapan tema, konsep dan topik bahasan serta konfirmasi mekanisme distribusi output.											Selasa 23 Juli 2019 Kegiatan Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran	
2	Penyusunan Analisis.												
3	Pembuatan Infografis.											Ditargetkan output akhir dapat selesai selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2019	
4	Sosialisasi, evaluasi sekaligus Penyempurnaan output kepada internal Pusat Kajian Anggaran											Jumat, 23 Agustus 2019 Presentasi produk kepada PKA	

## 5. PENUTUP

Demikianlah Catatan atas hasil komunikasi Mutiara Shinta Andini dengan Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran.

## **LAMPIRAN KEGIATAN 2**

## Lampiran 2.1 Daftar Inventaris Data



**Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman:  
[puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id)

### **Inventaris Data Kuantitatif Yang Digunakan Dalam Analisis “Critical View” Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”**

[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Persen)

PDB Penggunaan (Seri 2010)	2012				2013			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.55	5.51	5.47	5.45	5.68	5.38	5.32	5.33
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6.2	6.87	6.96	6.66	6.52	6.43	6.7	12.82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.74	16.78	-1.96	-0.12	2.97	3.1	12.04	7.72
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.99	10.13	9.45	9.78	7.55	5.28	5.64	1.99
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Eksport Barang dan Jasa	6.84	1.71	-2.61	1.05	3.5	2.1	1.34	9.44
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	11.05	15.43	0.5	5.85	2.92	0.88	4.93	-0.85
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.11	6.21	5.94	5.87	5.54	5.59	5.52	5.58
PDB Penggunaan (Seri 2010)	2014				2015			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.23	5.15	5.12	5.08	4.99	4.97	4.96	4.92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	23.15	22.42	5.76	-0.49	-8.06	-7.98	6.57	8.33
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.06	-1.84	1.17	0.87	2.92	2.62	7.09	7.1
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.44	4.02	4.35	4.05	4.59	4	4.93	6.43
5. Perubahan Inventori	-5.66	-5.41	177	61.51	-	-	-	-
6. Eksport Barang dan Jasa	3.14	1.45	4.94	-4.45	-0.63	-0.26	-0.96	-6.42
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5.06	0.43	0.21	2.98	-2.58	-7.07	-6.47	-8.62
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.12	4.94	4.93	5.05	4.83	4.74	4.78	5.15
PDB Penggunaan (Seri 2010)	2016				2017			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4.96	5.09	5.02	4.98	4.94	4.95	4.91	4.98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6.41	6.73	6.67	6.75	8.08	8.53	6.04	5.26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.43	6.21	-2.96	-4.02	2.69	-1.94	3.46	3.8
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.67	4.18	4.24	4.79	4.77	5.34	7.08	7.26
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Eksport Barang dan Jasa	-3.08	-1.51	-5.89	3.9	8.36	2.73	16.48	8.42
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-4.98	-3.43	-4.09	2.74	4.78	0.18	15.4	11.91
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	4.94	5.21	5.03	4.94	5.01	5.01	5.06	5.19
PDB Penggunaan (Seri 2010)	2018				2019			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4.94	5.16	5	5.08	5.02	5.17	-	-
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	8.1	8.75	8.59	10.79	16.95	15.27	-	-
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.71	5.2	6.27	4.56	5.21	8.23	-	-
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	7.94	5.85	6.96	6.01	5.03	5.01	-	-
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-27.3	-	-
6. Eksport Barang dan Jasa	5.94	7.65	8.08	4.33	-1.86	-1.81	-	-
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	12.64	15.17	14.02	7.1	-7.36	-6.73	-	-
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.06	5.27	5.17	5.18	5.07	5.05	-	-

## Lampiran 2.2 Daftar Pustaka



**Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman:  
[puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id)

---

### **DAFTAR PUSTAKA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DATA SEKUNDER KUALITATIF DALAM ANALISIS “CRITICAL VIEW PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA”**

---

- Adharsya, Taufan. 2019. *Cuma Tumbuh 5,05%, Ini Biang Kerok Perlambatan Ekonomi RI*. CNBC Indonesia. Diakses Tanggal 1 Agustus 2019 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805121953-4-89864/cuma-tumbuh-505-ini-biang-kerok-perlambatan-ekonomi-ri>
- Asokawati, Cindyrika Purnama. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2012 – 2016*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Herman. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai*. Universitas Trisakti; Media Riset Akutansi, Auditing dan Informasi, Vol.7 No.1, April 2007: 83-105.
- Hidayatullah, Sri Rezky Wulandari. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia (Penelitian Pada Badan Pusat Statistik)*. Universitas Widyaatama: Bandung.
- Kementerian Keuangan. 2019. *APBN Kita Kinerja dan Fakta*. Edisi Juli 2019.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019*.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Realisasi Semester I Tahun 2019 dan Outlook APBN Tahun 2019*, Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI Jakarta 16 Juli 2019.
- Kontan. 2019. *Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak*. Diakses Tanggal 1 Agustus 2019 dari <https://insight.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-lesu-defisitanggaran-akhir-tahun-berpotensi-membengkak>
- Laucereno, Sylke Febrina. 2019. *Pak Jokowi, Ini Bukti Bahwa Ekonomi RI Sedang Lesu*. DetikFinance. Diakses Tanggal 1 Agustus 2019 dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4615907/pak-jokowi-ini-bukti-bahwa-ekonomi-ri-sedang-lesu>

## Lampiran 2.3 Draft Tulisan

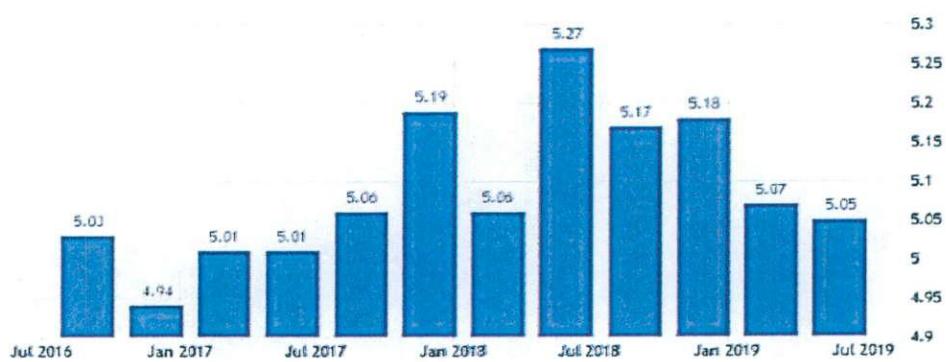
***Critical Review Analysis***

## STAGNASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI ANGKA 5%

### PERTUMBUHAN EKONOMI YANG CENDERUNG STAGNAN DI ANGKA 5 PERSEN

Pada kuartal I 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05 persen secara tahunan. Meski lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu, angka tersebut sedikit melambat dari kuartal IV 2018 yang mencapai 5,08. Sudah sejak tahun 2013 Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan di angka 5 persen setelah di tahun-tahun sebelumnya sempat mencapai kisaran angka pertumbuhan 6 persen. Realisasi pertumbuhan setiap tahunnya pun di bawah target yang telah ditentukan.

Gambar 9 Pertumbuhan Ekonomi 2016–2019 (Persen, YoY)



Sumber: *Trading Economics* 2019

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor yakni: Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi serta Perdagangan (Ekspor–Impor). Tren pertumbuhan yang mengalami perlambatan di semester I 2019 secara umum disumbang oleh perlambatan dua pos pengeluaran yakni *investasi* serta *perdagangan* (Gambar 2).

*Gambar 10 Pertumbuhan Sektor Pembentuk PDB Berdasarkan Pendekatan Pengeluaran Tahun 2018-2019 (Persen, YoY)*

	2018			2019		
	Q1	Q2	S1	Q1	Q2**	S1**
Kons RT*	5.0	5.2	5.1	5.3	5.3	5.3
Kons Pemerintah	2.7	5.2	4.1	5.2	4.4	4.3
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	7.9	5.9	6.9	5.0	5.7	5.3
Eksport	5.9	7.6	6.8	-2.1	0.6	-0.7
Impor	12.6	15.2	13.9	-7.8	-1.9	-4.3
<b>PDB (YoY)</b>	<b>5.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.2</b>	<b>5.07</b>	<b>5.10</b>	<b>5.1</b>

Sumber: Kementerian Keuangan 2019

### TANTANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

**Pertama** Bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan sektor pembentuk pertumbuhan itu sendiri terutama dari sektor-sektor investasi, perdagangan yang seringkali menghadapi gejolak internal dan eksternal. Mengutip CNBC Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan landainya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui Investasi. Dari faktor eksternal, ada ketidakpastian akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Ini disebut menyebabkan modal asing tak mau masuk ke negara berkembang dan berbalik ke negara maju. Begitupula sektor perdagangan yang terkait erat pada sektor investasi manufaktur bagaimana industri yang berkembang bisa menghasilkan nilai tambah.

**Kedua** Bagaimana dari sektor konsumsi rumah tangga bisa tetap dijaga pada level yang berkontribusi optimal dalam menopang pertumbuhan serta keseimbangan pasar domestik, dibarengi dengan upaya meningkatkan sektor-sektor pembentuk lainnya yaitu investasi dan perdagangan yang merupakan fokus pengembangan utama pemerintah untuk saat ini dan kedepannya.

**Ketiga** Bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi juga mampu tercapai pada tingkat yang optimal seiring dengan capaian angka pertumbuhan yang ditargetkan meningkat. Kualitas pertumbuhan ekonomi Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator yakni penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita yang lebih baik. Begitu juga dari sisi penerimaan negara, bagaimana target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai sehingga pada ujungnya bisa merealisasikan APBN yang sehat pada setiap bagian posturnya. Seharusnya untuk Indonesia, setiap 1 persen bisa menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja. Namun, berdasarkan perhitungan Fithra Faisal Hastiadi, Ekonom Universitas Indonesia, saat ini ini setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi paling banyak hanya bisa

menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja. Bahkan, dalam realisasinya hanya sekitar 130 ribu-150 ribu tenaga kerja. Ini tentu masih jauh dari kriteria pertumbuhan berkualitas yang seharusnya.

### **PERTANYAAN KRITIS TERKAIT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

**Pertama** Bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan sektor pembentuk pertumbuhan dari sektor-sektor investasi, perdagangan yang seringkali menghadapi gejolak internal dan eksternal. Apakah Pemerintah telah menemukan akar permasalahan penyebab perlambatan sektor investasi maupun perdagangan dalam sektor riil? Sudah optimalkah koordinasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha sehingga apa yang menjadi hambatan pertumbuhan sektor tersebut menjadi *clear* dan menjawab kebutuhan yang masih diperlukan dalam rangka peningkatan nilai investasi serta perdagangan Indonesia.

**Kedua** Bagaimana sektor konsumsi rumah tangga bisa tetap dijaga pada level yang berkontribusi optimal dalam menopang pertumbuhan serta keseimbangan pasar domestik, disaat pemerintah memprioritaskan meningkatkan sektor-sektor pembentuk lainnya yaitu investasi dan perdagangan? Bagaimana antisipasi pemerintah terhadap faktor-faktor penurunan konsumsi masyarakat dalam hal stabilisasi harga dan daya beli masyarakat?

**Ketiga** Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur target pertumbuhan sebagai indikator dalam APBN yang memiliki dampak luas serta sensitivitas cukup tinggi terhadap keseluruhan postur APBN terutama Penerimaan Negara? Pendekatan kebijakan seperti apa yang idealnya pemerintah lakukan sebagai upaya optimalisasi *multiplier effect* serta kualitas pertumbuhan yang diceriminkan oleh sasaran pembangunan Indonesia?. Dibandingkan negara tetangga di kawasan ASEAN, pendapatan per kapita Indonesia masih kalah jauh dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sebagai pembanding, pada 2018, pendapatan per kapita Indonesia hanya US\$3.927. Sementara, pendapatan per kapita Thailand mencapai US\$7.273,56, Malaysia US\$10.043, dan Singapura US\$64.567. Kondisi ini cukup ironis di tengah angka kemiskinan yang terus menurun selama empat tahun terakhir hingga ke level 1 digit. Per Maret 2019, angka kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 9,41 persen atau setara dengan 25,14 juta orang. Realisasi tersebut melandai dari tingkat kemiskinan September 2018 yang mencapai 9,66 persen. Jika ingin keluar dari jebakan tersebut, PDB per kapita Indonesia harus lebih besar dari US\$12.000. Artinya, pendapatan per kapita Indonesia harus melonjak setidaknya 3 kali lipat.

## **LAMPIRAN KEGIATAN 3**

### Lampiran 3.1 Template Infografis



### Lampiran 3.2 Draft 1



### Lampiran 3.3



## **LAMPIRAN KEGIATAN 4**

## Lampiran 4.1 Bahan Presentasi



## Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Pertama

Optimalisasi pertumbuhan sektor pembentuk pertumbuhan itu sendiri terutama investasi dan perdagangan yang seringkali menghadapi gejolak internal dan eksternal



Kedua

Menjaga sektor konsumsi rumah tangga tetap pada level yang berkontribusi optimal dalam memicu pertumbuhan serta keseimbangan pasar domestik.



Ketiga

Bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi juga mampu tercapai pada tingkat yang optimal seiring dengan capaian angka pertumbuhan yang ditargetkan meningkat dilihat dari beberapa indikator sasaran pembangunan yakni penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita yang lebih baik



PERTAMA

Apakah Pemerintah telah menemukan akar permasalahan penyebab perlambatan sektor investasi maupun pertumbuhan dalam sektor ini? Sudah optimalkan koordinasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha sehingga apa yang menjadi hambatan pertumbuhan sektor tersebut menjadi clear dan menjawab kebutuhan yang masih diungkapkan dalam rangka peningkatan nilai investasi serta perdagangan Indonesia



KEDUA

Bagaimana sektor konsumsi rumah tangga bisa tetap dijaga pada level yang berkontribusi optimal dalam memicu pertumbuhan serta keseimbangan pasar domestik, disaat pemerintah memprioritaskan meningkatkan sektor-sektor penting lainnya yakni investasi dan perdagangan? Bagaimana antisipasi pemerintah terhadap faktor-faktor penurunan konsumsi masyarakat dalam hal stabilisasi harga dan daya beli masyarakat?

Pertanyaan Kritis Terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



KETIGA

Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur target pertumbuhan sebagai indikator dalam APBN yang memiliki dampak luas serta sensitivitas cukup tinggi terhadap keseluruhan postur APBN terutama Penerimaan Negara? Pendekatan kebijakan seperti apa yang idealnya pemerintah lakukan sebagai upaya optimalisasi *multiplier effect* serta kualitas pertumbuhan yang dicerminkan oleh sasaran pembangunan Indonesia?



## Lampiran 4.2 Laporan Singkat Hasil Sosialisasi Aktualisasi CPNS



Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman:  
[puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id)

### LAPORAN SINGKAT HASIL SOSIALISASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Jum'at, 23 Agustus 2019
<u>Pukul</u>	:	14.00 WIB s/d 15.30 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	Presentasi Aktualisasi CPNS Pusat kajian Anggaran
<u>Pimpinan</u>	:	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

#### 1. PEMBUKAAN

Para CPNS Pusat kajian Anggaran termasuk Mutiar Shinta Andini, S.E. melakukan Sosialisasi terkait dengan output yang dihasilkan dalam aktualisasi, serta meminta saran perbaikan dari hasil analisis yang telah dihasilkan. Acara sosialisasi dilaksanakan pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran, Para Koordinator Bidang di Pusat Kajian Anggaran, serta seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran.

#### 2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun dari hasil sosialisasi yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan analisis yang penulis lakukan, antara lain:

- a) Pada bagian kanan atas output tidak perlu diberikan keterangan bulan tahun karena dengan mencantumkan tersebut bisa menimbulkan arti bahwa output yang dihasilkan merupakan produk wajib yang berkelanjutan dengan konsekuensi anggaran;
- b) Terdapat masukan untuk Sub penamaan output lebih kepada "View" bukan "review" karena struktur tulisan yang ringkas cepat lebih sesuai;
- c) Terdapat masukan untuk opsi-opsi struktur tulisan agar langsung kepada tantangan dan pertanyaan kritis tanpa menampilkan data singkat;
- d) Ada beberapa masukan untuk output selanjutnya agar mekanisme penetuan topik yang diangkat bisa melihat terlebih dahulu list-list topik yang belum pernah diangkat atau jarang diangkat terkait;

### 3. PENUTUP

Demikianlah Laporan Singkat atas hasil Sosialisasi aktualisasi Mutiara Shinta Andini dengan para Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, serta hasil masukan dan *feedback* perbaikan yang diperoleh dari tahapan kegiatan sosialisasi serta evaluasi yang telah dilaksanakan.

Mengetahui,  
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.SI  
NIP. 19710911 199703 1 005

### Lampiran 4.3 Infografis Akhir



Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI 2019

## Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Pertama

Optimalisasi pertumbuhan sektor pembentuk pertumbuhan itu sendiri terutama investasi dan perdagangan yang seringkali menghadapi gejolak internal dan eksternal



Kedua

Menjaga sektor konsumsi rumah tangga tetap pada level yang berkontribusi optimal dalam menopang pertumbuhan serta keseimbangan pasar domestik.



Ketiga

Bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi juga mampu tercapai pada tingkat yang optimal seiring dengan capaian angka pertumbuhan yang ditargetkan meningkat dilihat dari beberapa indikator sasaran pembangunan yakni penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita yang lebih baik



### PERTAMA

Bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan sektor pembentuk pertumbuhan dari sektor-sektor investasi, perdagangan yang seringkali menghadapi gejolak internal dan eksternal. Apakah Pemerintah telah menemukan akar permasalahan penyebab perlambatan sektor investasi maupun perdagangan dalam sektor riil? Sudah optimalkah koordinasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha sehingga apa yang menjadi hambatan pertumbuhan sektor tersebut menjadi clear dan menjawab kebutuhan yang masih diperlukan dalam rangka peningkatan nilai investasi serta perdagangan Indonesia



### KEDUA

Bagaimana sektor konsumsi rumah tangga bisa tetap dijaga pada level yang berkontribusi optimal dalam menopang pertumbuhan serta keseimbangan pasar domestik, disaat pemerintah memprioritaskan meningkatkan sektor-sektor pembentuk lainnya yaitu investasi dan perdagangan? Bagaimana antisipasi pemerintah terhadap faktor-faktor penurunan konsumsi masyarakat dalam hal stabilisasi harga dan daya beli masyarakat?

### KETIGA



Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur target pertumbuhan sebagai indikator dalam APBN yang memiliki dampak luas serta sensitivitas cukup tinggi terhadap keseluruhan postur APBN terutama Penerimaan Negara? Pendekatan kebijakan seperti apa yang idealnya pemerintah lakukan sebagai upaya optimalisasi *multiplier effect* serta kualitas pertumbuhan yang dicerminkan oleh sasaran pembangunan Indonesia seperti penyerapan tenaga kerja serta pendapatan perkapita yang masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN Singapura, Thailand dan Malaysia yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita 2-4 kali lipat dari Indonesia.

### Pertanyaan Kritis Terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

